

**EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN GROBOGAN DALAM
MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ATIKA NDARU PRASETYO

C100170013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN GROBOGAN DALAM MENGHADAPI MASALAH
KETENAGAKERJAAN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ATIKA NDARU PRASETYO

C100170013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Dr. Nuria Siswi E, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN GROBOGAN DALAM MENGHADAPI MASALAH
KETENAGAKERJAAN**

OLEH
ATIKA NDARU PRASETYO
C100170013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 9 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Nuria Siswi E, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Harun, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nunik Nurhayati, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



ATIKA NDARU PRASETYO

C100170013

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GROBOGAN DALAM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

Begitu banyaknya peraturan-peraturan pemerintah yang ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam mengurangi dan mengatasi masalah pengangguran yang semakin hari semakin meningkat, meningkatkan sebuah nilai perekonomian yang Peranan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terutama di wilayah Grobogan mewajibkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Dalam hal pekerja dan pengusaha melakukan hubungan kerja melalui pembuatan suatu perjanjian kerja. Selama setahun terakhir, porsi pekerja informal turun sebesar 11,66 persen poin dibanding keadaan pada Agustus 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Grobogan dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan di wilayah Grobogan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis hukum empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitik yang memiliki upaya menggambarkan peristiwa dan peristiwa yang menjadi fokus mereka, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa-peristiwa terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis lainnya agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan telah melakukan tugas dan fungsinya dalam mendukung otonomi Daerah Antara lain dengan menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan. Pemerintah Daerah Grobogan juga belum melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja dikarenakan masih mengkaji peraturan lama serta Bupati belum membuat Perda untuk mengatasi dan menanggulangi beberapa masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Grobogan.

Kata Kunci: kedudukan tugas kantor dinas tenaga kerja, fungsi kantor dinas tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan

Abstract

There are so many government regulations that want to provide welfare to the community in reducing and overcoming the problem of unemployment which is increasing day by day, increasing an economic value. The role of the government, in this case the Manpower Office (Disnaker) especially in the Grobogan area, requires the settlement of industrial relations disputes through mediation. In the case of workers and employers entering into an employment relationship through the making of an employment agreement. Over the past year, the share of informal workers decreased by 11.66 percentage points compared to the situation in August 2018. The purpose of this study was to determine the implementation of the duties and functions as well as the policies of the Manpower Office of Grobogan Regency in dealing with labor problems in the Grobogan area. The type of

research in this research is empirical law type with the nature of research that is descriptive analytic which has an effort to describe the events and events that become their focus, without giving special treatment to events, especially to confirm other hypotheses in order to strengthen old theories or within the framework of developing new theories. Two sources of data used in this study are primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained through library materials. The results of this study are that the Manpower and Transmigration Office of Grobogan Regency has carried out its duties and functions in supporting regional autonomy, among others, by dealing with labor problems in Grobogan Regency.

Keywords: job position, function of the labor office, employment problems

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perlindungan dan pelayanan kepada warga negara adalah penciptaan lapangan kerja demi penghidupan yang layak. Hak warga Negara atas pekerjaan dan juga diatur dalam undang undang no 13 tahun 2003 pasal 4 huruf b menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk . mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, yang sekarang sudah diganti pada UU No 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 1 “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Aloysius Uwiyono memandang hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha (Uwiyono,2014). Hubungan kerja yang baik antara pekerja dan pengusaha dapat membuat produktivitas kerja karyawan meningkat. Guna mencapai produktivitas kerja karyawan yang tinggi, perusahaan perlu memperhatikan masalah upah dan jaminan sosial yang merupakan faktor pendorong dalam mencapai produktivitas kerja seperti yang tertuang dalam pasal 81 angka 68 uu cipta kerja yang berbunyi bahwa upah minimum yang berlaku ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan pasal tersebut untuk pengupaan ketenagakerjaan pelaksana UU Ketenagakerjaan yang

sudah ada sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja. Upah Minimum Kota/Kabupaten diasumsikan sebagai upah minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 kabupaten/kota.

Selain banyaknya peraturan guna mensejahterakan tenaga kerja atau buruh, banyak juga diterbitkan peraturan-peraturan pemerintah yang ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam mengurangi dan mengatasi masalah pengangguran yang semakin hari semakin meningkat, meningkatkan sebuah nilai perekonomian yang Peranan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terutama di wilayah Grobogan mewajibkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Hal tersebut terkait pekerja dan pengusaha melakukan hubungan kerja melalui pembuatan suatu perjanjian kerja

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2019 sebanyak 727,59 ribu orang, turun sekitar 10 ribu orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,10 persen. Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 9 ribu orang, sedangkan penduduk yang bekerja berkurang sekitar 19 ribu orang. Akibatnya angka TPT naik sebesar 1,35 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2018 menjadi 3,59 persen pada Agustus 2019. TPT laki-laki (4,50 persen) lebih tinggi daripada TPT perempuan (2,17 persen). TPT tertinggi tercatat pada penduduk dengan pendidikan tertinggi SMK, yaitu sebesar 12,51 persen.

Menurut Undang Undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Pasal 3 dijelaskan tujuan ditetapkan UU tersebut Regulasi yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal ini berisi tentang upaya penciptaan lapangan kerja termasuk mempermudah persyaratan pendirian usaha dan faktor pendukung investasi lainnya. Sehingga tujuan utama dari penetapan Upah Minimum Provinsi adalah membuka lapangan kerja seluas luasnya dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan perbaikan iklim investasi di Indonesia khususnya terkait ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dikaji penulis yaitu, bagaimana Pelaksanaan Tugas dan fungsi serta kebijakan pemerintah daerah Grobogan dalam

mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas dan fungsi serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Grobogan melalui Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitik Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan primer yaitu studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan Grobogan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Grobogan dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan di wilayah Grobogan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan tata Kerja Organisasi perangkat daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. Sedangkan fungsi dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan adalah perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pengoordinasian, pengembangan dan fasilitas kegiatan dibidang

tenaga kerja dan transmigrasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, pengelolaan kesekretariatan dinas, pengelolaan UPTD dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala sub bagian umum di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan diketahui bahwa Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Grobogan Agustus 2020 sebanyak 744 ribu orang, naik sekitar 11 ribu orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit naik menjadi sebesar 69,77 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,50 persen atau sebanyak 33,5 ribu orang, yang berarti meningkat sebesar 0,96 persen atau meningkat sebesar 7,53 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Penduduk bekerja sebanyak 710 ribu orang pada Agustus 2020 naik sebanyak tiga ribu orang dari Agustus 2019. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan usaha 3 kategori pada Agustus 2020, penduduk Kabupaten Grobogan paling banyak bekerja masih di lapangan usaha Pertanian yaitu sebanyak 312,23 ribu orang (43,92 persen), Sebanyak 565,87 orang (79,60 persen) bekerja pada kegiatan informal. Persentase pekerja informal mengalami kenaikan dibanding kondisi Agustus 2019 yang nilainya sebesar 68,03 persen. Tercatat sebanyak 101 ribu orang Penduduk Usia Kerja (PUK) terdampak Covid-19 atau sebesar 9,49 persen. Mereka terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (12 ribu orang), BAK karena Covid (seribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (4 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (82 ribu orang).

Isu strategis dinas tenaga kerja dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan antara lain tingginya angka pengangguran, fleksibilitas pasar tenaga kerja, penciptaan SDM yang berkualitas dan produktif, perluasan kepesertaan jaminan social, optimalisasi peran dan fungsi lembaga hubungan industrial, optimalisasi program transmigrasi, masih belum optimalnya pelayanan public Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

Permasalahan utama dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran yang ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja

di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan evaluasi dan pemantauan secara mendalam sehingga dihasilkan isu strategis urusan ketenagakerjaan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gobogan Tahun 2016-2021 yang berhubungan dengan peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Grobogan antara lain perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar, sarana dan prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.

3.2 Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Grobogan melalui Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020 bahwa arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam menangani masalah ketenagakerjaan adalah penjabaran dari Misi yang kelima sebagai berikut:

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan seperti: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja, Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten /Kota, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Siswa, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi.

Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja meliputi : Penyusunan Rencana tenaga kerja makro dan Penyusunan rencana tenaga kerja mikro.

Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan: Pelayanan Antar kerja di daerah Kabupaten/Kota meliputi : Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, Pelayanan antar kerja, Perluasan kesempatan kerja, Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.

Penerbitan izin lembaga Penempatan Tenaga meliputi : Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian LPTKS.

Pengelolaan informasi pasar kerja meliputi: Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi, Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, job fair/bursa kerja, Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja migran, Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan, Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA.

Program Hubungan Industrial. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja meliputi: Pengesahan peraturatan perusahaan, Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan, Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social, Pencegahana dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota, Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi, Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten/kota, Pengembangan pelaksanaan jaminan social.

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Program ini diimlempasikan dalam bentuk penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daera kabupaten/kota, yang meliputi: Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama, Pembangunan Trasmigrasi yang berasal dari satu daerah/kota, Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari satu daerah/kota, Penyuluhan transmigrasi, Pelatihan transmigrasi.

Berdasarkan Program tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam hasil wawancara beliau juga menyampaikan bahwa untuk melaksanakan peran dalam menangani masalah pengangguran di Kabupaten Grobogan yang pertama progam peningkatan dan penempatan kerja, progam hubungan industrial yang menyangkut kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang masuk didalam BPJS²⁸. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut agar masyarakat atau pencari kerja mampu untuk membuka peluang usaha

mandiri, selain itu agar masyarakat tidak hanya menggantungkan hidupnya dari bekerja tetapi membuka lapangan kerja sendiri.

Sikap dari Pemda Kabupaten Grobogan pasca adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharapkan tidak terjadi tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan seperti yang disosialisasikan plh Bupati Grobogan tgl 8 sampai dengan 9 April 2021 di Sunan Hotel Solo. Kondisi hingga akhir bulan Juni ini masih dilakukan identifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) Peraturan Daerah dan 23 (dua puluh tiga) Peraturan Bupati yang terkait tindak lanjut UU tentang Cipta Kerja. Identifikasi dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan terhadap UU Cipta Kerja disamping juga tetap selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat agar perekonomian daerah tetap stabil. Plh. Bupati Grobogan mengemukakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengatur banyak hal dengan tujuan antara lain untuk penyeragaman kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut meliputi 11 klaster pengaturan, yaitu : penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Beliau juga menyampaikan bahwa persoalan regulasi yang sering muncul adalah adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut melalui pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menghilangkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, terjadinya efisiensi dalam proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan hilangnya ego sektoral antar instansi pemerintahan.

Peraturan Peraturan dilevel Kabupaten harus direvisi dan masih dikaji karena peraturan lama ada yg belum mengakomodir salah satu/beberapa kebijakan didalam UU Ciptaker, karena Pemerintah daerah tidak bisa serta merta melaksanakan amanat UU mengingat masih ada otonomi daerah dan aturan UU yang sifatnya umum. Jadi sementara ini Pemkab Grobogan masih melaksanakan

peraturan level Kabupaten yg lama sebelum yg revisi ditetapkan. Prinsipnya, Kabupaten Grobogan mendukung UU Ciptakerja dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masyarakat Grobogan

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan telah melakukan tugas dan fungsinya dalam mendukung otonomi Daerah Antara lain dengan menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan adalah melaksanakan kebijakan dari misi ke 5 . Kebijakan itu meliputi: Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja meliputi : Penyusunan Rencana tenaga kerja makro dan Penyusunan rencana tenaga kerja mikro.

Program Penempatan Tenaga Kerja, Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, penerbitan izin lembaga penempatan Tenaga, pengelolaan informasi pasar kerja.

Program Hubungan Industrial, Program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program ini diimplementasikan dalam bentuk penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota.

Tidak adanya program kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Grobogan membuat pengangguran semakin banyak. Faktor lainnya yaitu penanggulangan dari pihak Pemerintah kurang maksimal menggunakan program seadanya atau, sehingga dari 5 tahun terakhir peningkatan angka pekerja hanya naik 4%. Bupati belum membuat Perda untuk mengatasi dan menanggulangi beberapa masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Grobogan, karena Bupati baru

saja dilantik dan berkontribusi dengan Dinas Tenaga Kerja Grobogan, untuk membuat peraturan yang baik dan sesuai Undang Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (2019). *Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2007-2019*. Grobogan: Badan Pusat Statistik
- Grobogan21. (2021). Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Hasil wawancara dengan Bapak Aditya selaku Bappeda Kabupaten Grobogan pada tanggal 5 Juli 2021
- Hasil wawancara dengan Bapak Kistowo selaku Ka Su Bag Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Grobogan tanggal 5 Juni 2021
- Kurniawan, H., & Alimudin, A. (2015). *Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Garam (Persero)*. Ilmu Manajemen Magistra, 1(2)
- Uwiyono, A. (2014). *Asas - Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers